

KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN KEPEMIMPINAN DUA PRESIDEN RI YANG PERTAMA

Sayidiman*)

Ketahanan Nasional amat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang berjalan di satu negara. Kepemimpinan yang bermutu di semua tingkat dan bidang kehidupan berdampak positif terhadap Ketahanan Nasional. Sebaliknya kepemimpinan yang kurang bermutu berakibat negatif. Hal itu juga berlaku untuk Indonesia.

Tahun 2004 merupakan tahun yang amat penting bagi kepemimpinan di Indonesia. Pemilihan Umum pada bulan April akan menentukan siapa yang menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD. Mereka mempunyai peran penting dalam kepemimpinan bangsa karena menjalankan fungsi legislatif yang menentukan berbagai undang-undang dan keputusan lainnya yang harus dijalankan pihak eksekutif dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kemudian pada bulan Juli diadakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden RI tahap pertama yang dapat dilanjutkan dengan tahap kedua pada bulan September apabila diperlukan. Presiden dan Wakil Presiden sebagai pimpinan

eksekutif lebih-lebih mempunyai peran penting dalam membentuk Negara Republik Indonesia dan Ketahanan Nasional di masa depan.

Kepemimpinan nasional yang terbentuk itu diharapkan mengakhiri masa transisi yang telah berjalan sejak berakhirnya kepemimpinan Soeharto. Masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnopoetri tidak dapat diabaikan, namun masa itu lebih bersifat transisi sebagai peralihan dari kepemimpinan Soeharto kepada keadaan negara dan bangsa yang benar-benar sesuai dengan kehendak rakyat. Berhubungan dengan itu perlu kita mengadakan penilaian atas segala ke-

*) Let. Jen. TNI (Pur) Sayidiman, Mantan Gubernur Lemhannas.

berhasilan dan kegagalan kepemimpinan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto sebagai bahan pelajaran untuk kepemimpinan yang akan datang. Terutama mengenai hal mengapa di masa lampau Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto mengalami kegagalan di akhir kepemimpinannya, padahal pada permulaannya kedua Presiden itu menunjukkan sukses besar yang diakui tidak saja oleh bangsa sendiri, tetapi juga oleh dunia internasional. Karena kegagalan pada akhir kepemimpinan itu seakan-akan seluruh keberhasilan yang telah mereka capai sebelumnya menjadi hilang sama sekali. Akibatnya adalah bahwa setiap kepemimpinan nasional baru seakan-akan harus mulai dari titik awal lagi, yang amat merugikan perjalanan dan perjuangan bangsa.

Kepemimpinan nasional di masa depan harus dapat mencegah terjadi hal serupa, sehingga penggantinya selalu dapat bermula pada kondisi bangsa yang sudah mencapai tingkat kemajuan tertentu. Juga akan terjamin kontinuitas perjuangan dan pembangunan negara dan bangsa yang tidak membuang-buang energi yang telah dikeluarkan.

Penilaian yang akan dikemukakan tentu tidak sempurna. Akan tetapi hendaknya dapat berguna bagi penilaian yang le-

bih luas dan saksama sehingga benar-benar bermanfaat bagi masa depan negara dan bangsa.

Keberhasilan dan Kegagalan Kepemimpinan Soekarno

Kalau ada orang yang bicara tentang perbedaan antara *borne leaders* (pemimpin karena bakat) dan *made leaders* (pemimpin karena dibentuk), maka Soekarno termasuk kategori borne leader. Hal itu sudah dibuktikannya sejak membentuk dan memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Oleh sebab itu kepemimpinan beliau sebagai Presiden RI tidak menunjukkan kecanggungan. Malahan hampir tidak masuk akal andai kata terpilih orang lain sebagai Presiden RI ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945. Sekalipun Mohamad Hatta juga menunjukkan kepemimpinan yang berbakat sejak menjadi mahasiswa di Belanda dan dalam perjuangannya kemudian di tanah air, namun toh kepemimpinan Soekarno masih dinilai lebih unggul oleh bagian terbesar bangsa Indonesia. Sebab itu pada tahun 1945 Soekarno ditetapkan sebagai Presiden RI dan Mohamad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang merupakan dwi tunggal kepemimpinan nasional. Juga pada tahun 1950 ketika sebagai hasil Konferensi

Meja Bundar dengan Belanda harus dibentuk pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), Soekarno dipilih lagi sebagai Presiden, baik oleh kaum pejuang Republik maupun orang Indonesia yang tadinya bekerja sama dengan Belanda. Dan ketika RIS beralih kembali ke RI pada bulan Agustus 1950, tidak aneh bahwa Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden lagi.

Jadi legitimasi Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia kuat sekali, dan itu beliau manfaatkan untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Kepemimpinannya berhasil membentuk persatuan bangsa Indonesia, meninggalkan perpecahan yang diakibatkan oleh politik penjajah Belanda *divide et impera*. Kepemimpinan Soekarno membuktikan kesalahan perkiraan banyak pakar asing dan sementara cendekiawan Indonesia yang mengatakan bahwa Indonesia tak mungkin terbentuk sebagai satu bangsa. Mereka mengatakan bahwa terdapat terlalu banyak perbedaan dalam budaya dan pandangan hidup setiap etnik di Indonesia untuk dapat menjadi satu negara dan bangsa. Indonesia hanya ada selama menghadapi Belanda, kata mereka. Begitu kekuasaan Belanda lenyap Indonesia akan rontok sebagai pasir, terpecah oleh per-

bedaan yang banyak itu. Akan tetapi kepemimpinan Soekarno membuktikan bahwa Indonesia dapat menjadi negara dan bangsa sekalipun ada banyak perbedaan di dalam tubuhnya. Dan RI mengambil sebagai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah keberhasilan kepemimpinan Soekarno yang tak dapat ditolak atau dibantah oleh siapa pun. Rasa kebangsaan itulah yang memungkinkan Indonesia menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan rintangan untuk membuat penjajah Belanda dan dunia internasional pada akhir tahun 1949 mengakui kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Wibawa Soekarno amat efektif ketika pada 5 Juli 1959 beliau menyerukan agar bangsa Indonesia kembali kepada UUD 1945 dan meninggalkan sistem politik demokrasi liberal yang diterapkan sejak 1950. Rakyat Indonesia umumnya telah muak dengan kondisi negara yang pemerintahannya sebentar-sebentar berganti, bahkan ada pemerintah yang hanya berjalan 3 bulan saja. Peningkatan kesejahteraan yang diharapkan rakyat tidak mungkin terwujud dalam kondisi semacam itu. Karena itu rakyat pada mulanya tidak menolak Soekarno menggantikan sistem politik demokrasi liberal dengan sistem politik demokrasi

terpimpin yang memberikan wewenang besar kepada eksekutif dan khususnya kepada Presiden Soekarno.

Kepemimpinan Soekarno juga efektif sekali ketika menghadapi pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung Amerika Serikat dan Inggris, serta banyak bangsa Asia Tenggara yang dapat mereka pengaruhi. Meskipun RI dituduh kaum pemberontak serta bangsa-bangsa yang mendukung mereka, telah berpihak kepada komunis, tetapi pemerintah RI dan TNI dapat membuktikan bahwa tuduhan itu salah. Diplomasi yang dilakukan pemerintah serta operasi militer TNI yang mendukungnya dapat membuka mata AS bahwa tuduhan salah itu justru dapat merugikan posisinya di Asia Tenggara. Dalam tempo sekitar dua tahun pemberontakan yang meluas di Sumatra dan Sulawesi dapat diakhiri ketika mayoritas para pemberontak bersedia kembali kepada Ibu Pertiwi. Dengan begitu Indonesia dapat diselamatkan dari bahaya pecahnya Republik menjadi bagian yang pro-Amerika dan bagian lain yang anti-AS, satu negara terbelah (*divided nation*) seperti yang terjadi pada Korea Selatan dan Korea Utara, Jerman Timur dan Jerman Barat serta RRC dan Taiwan. Republik Indonesia tetap satu negara kesatuan, seka-

lipun masih harus memperjuangkan kembalinya Irian Barat ke wilayahnya.

Presiden Soekarno juga sukses dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam kesatuan RI dan kemudian dinamakan Irian Jaya. Itu semua dapat tercapai tanpa harus melakukan perang atau penggunaan kekerasan senjata dengan Belanda yang semula tidak mau menyerahkan daerah itu. Soekarno menggunakan pengaruh politiknya untuk memperoleh senjata dari Uni Soviet, ketika AS tidak mau menjual senjatanya kepada RI. Bahkan TNI dapat dikembangkan menjadi kekuatan militer terbesar dan terkuat di Asia Tenggara, baik di darat, laut maupun udara.

Ketika Belanda tetap saja tidak mau menyerahkan Irian Barat sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 dan bahkan tidak mau lagi merundingkan masalah itu secara damai, Indonesia dengan pimpinan Soekarno memutuskan bahwa Irian harus masuk RI dengan cara apa pun untuk mewujudkan kedaulatan Republik Indonesia yang wilayahnya adalah bekas Hindia Belanda. Pada saat TNI siap menggunakan kekuatannya untuk melaksanakan kehendak rakyat Indonesia, AS khawatir bahwa hasil dari penggunaan kekuatan militer Indonesia akan mengun-

tungkan posisi Uni Soviet di Asia Tenggara. Maka AS melakukan intervensi yang mencegah terjadinya perang antara Indonesia dan Belanda, dan memaksa Belanda meninggalkan Irian Barat. Melalui proses yang mengikutsertakan PBB maka Irian Jaya pada tahun 1961 sudah menjadi bagian integral wilayah Republik Indonesia. Dengan begitu perjuangan kemerdekaan telah mencapai tahap penting, yaitu terwujudnya Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke. Inilah keberhasilan kepemimpinan Soekarno yang nyata.

Selanjutnya seharusnya Soekarno membangun bangsa sesuai dengan gagasannya sendiri, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setelah masalah Irian Jaya selesai mayoritas bangsa mengharapkan Presiden Soekarno memusatkan perhatiannya kepada peningkatan kesejahteraan bangsa yang telah mengalami kemunduran sejak terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta. Dalam pada itu juga pemberontakan DI/TII di bawah pimpinan Kartosuwiryo dan Kahar Muzakkar dapat diselesaikan, sehingga Jawa Barat dan Sulawesi Selatan bebas untuk mengembangkan potensinya yang besar.

Namun kemudian mulailah

kepemimpinan Soekarno menunjukkan langkah-langkah yang akhirnya menyebabkan kegagalannya. Bukannya mengadakan konsolidasi untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan, Soekarno justru mulai dengan move politik baru ketika melakukan konfrontasi terhadap Malaysia. Mungkin tidak terlalu salah bahwa Soekarno curiga terhadap usaha Inggris membentuk Malaysia, yaitu usaha untuk mengepung Indonesia. Akan tetapi Soekarno mengembangkan strategi yang kurang memperhatikan kondisi bangsanya sendiri yang masih perlu dibangun kekuatannya. Memang Presiden Soekarno seringkali menyatakan bahwa beliau tidak ada minat terhadap ekonomi. Akan tetapi kepemimpinannya salah besar dan berakibat fatal bagi Indonesia kalau beliau tidak mau memperhatikan pembangunan ekonomi. Untuk mendukung segala perjuangan politik yang mungkin harus didukung kekuatan militer, sekurang-kurangnya sebagai *leverage*, Indonesia memerlukan kekuatan ekonomi; apalagi menghadapi Inggris yang bukan kekuatan sembarangan. Sebaliknya Presiden Soekarno malahan menghambur-hamburkan kemampuan ekonomi yang sudah amat terbatas untuk menjalankan berbagai usaha politik

lainnya, seperti pembentukan *New Emerging Forces (NEFOS)* di dunia untuk menyaingi kekuatan dunia yang dikendalikan AS dan sekutunya yang disebutnya *Old Established Forces (OLDEFOS)*. Konsep Soekarno itu tidak salah dan bahkan hingga kini pada tahun 2004 tetap valid, tetapi beliau tidak mau tahu bahwa untuk memperjuangkan satu konsep besar diperlukan sumberdaya yang tidak sedikit. Selama ekonomi nasional tidak dikembangkan tidak mungkin ada kemampuan memobilisasi sumberdaya dalam jumlah besar. Maka satu ketika Soekarno yang dikenal sebagai Pemimpin Rakyat dan menamakan diri Penyambung Lidah Rakyat tidak segan-segan untuk mengatakan: "Kalau perlu saya akan memerintahkan rakyat makan batu"! Pada saat itu Soekarno sudah kehilangan proporsi dalam pandangannya dan dalam bertepo-seliro atau berempati dengan rakyat Indonesia yang kehidupannya makin berat.

Andai kata waktu itu Soekarno dapat mengendalikan rasa *vanity*-nya, mungkin beliau masih dapat disadarkan oleh lingkungannya akan bahaya yang timbul dari strateginya. Akan tetapi tidak demikian dan itu dimanfaatkan PKI yang kemudian berhasil menempatkan diri lebih kuat di sekitar Soekarno dengan

mendesak mundur kaum nasionalis. Dalam kondisi demikian nasionalis yang bersifat oportunis seperti dr. Soebandrio turut mendukung peran PKI, sebagaimana dilakukannya sebagai pimpinan Badan Pusat Intelijen (BPI). Hasilnya adalah pemberian informasi yang serba salah kepada Presiden Soekarno yang makin menjadikan beliau kehilangan realisme. Akibatnya adalah bahwa dalam masyarakat yang semula sepenuhnya mendukung kepemimpinan Soekarno, mulai timbul kesangsian bahwa beliau kena pengaruh kuat PKI. Kaum nasionalis dan pimpinan TNI-AD melalui Jenderal A. Yani yang cinta tulus kepada Soekarno bermaksud mengamankan beliau dari pengaruh negatif yang membuat beliau kehilangan realisme. Akan tetapi kelihaihan PKI membuat Soekarno malahan menuduh kaum nasionalis dan TNI-AD itu komunisto-phobi.

Dalam pada itu ekonomi makin mundur dan rakyat makin gelisah, satu kondisi yang justru dikehendaki PKI. Bahwa kemudian PKI melancarkan move dengan membunuh jenderal-jenderal TNI-AD serta membentuk Dewan Revolusi, itu semua menunjukkan bahwa Soekarno sudah banyak kehilangan wibawa kepemimpinannya. Itulah yang kemudian men-

jadi akhir kepemimpinannya, karena ternyata lebih banyak rakyat yang tidak setuju dengan peran PKI yang makin luas itu.

Dengan demikian seakan-akan semua sukses yang telah ditunjukkan Soekarno hingga tahun 1962 tidak ada artinya. Satu hal yang menyedihkan bagi Soekarno, tetapi tidak kalah menyedihkan bagi bangsa Indonesia.

Sebagai akibat tidak langsung dari kepemimpinan yang mengabaikan perbaikan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat, juga tidak ada usaha nyata dan terarah untuk peningkatan usaha pendidikan umum. Padahal pendidikan amat penting untuk membentuk Manusia Indonesia yang sesuai dengan perkembangan zaman dan cakap untuk mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Sebaliknya kualitas pendidikan makin menurun karena kondisi keuangan makin buruk. Soekarno menganggap bahwa yang diperlukan rakyat adalah pendidikan politik, yaitu indoktrinasi tentang ajarannya dan pandangannya. Bukan pendidikan yang meningkatkan kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Adalah aneh bahwa Soekarno sebagai seorang insinyur tidak menyadari bahwa umat manusia sedang berada dalam perkembangan yang amat pesat dalam

ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan bahwa hal itu akan amat menentukan tidak hanya kemajuan satu bangsa tetapi bahkan amat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Salah satu indikasi tentang pandangan Soekarno yang kurang memberikan bobot kepada ilmu pengetahuan dan teknologi adalah serangannya kepada kaum cendekiawan yang dikatakannya hanya dapat melakukan *textbook-thinking*. Dengan serangan itu kaum cendekiawan dianggapnya kurang bermanfaat bagi perjuangan nasional, kecuali kalau mereka menitikberatkan perhatiannya kepada indoktrinasi yang beliau lakukan.

Sikap Soekarno yang secara terang-terangan memuji PKI dan mengatakan bahwa partai itu serta pengikutnya lebih nasionalis dari pada PNI dan kalangan nasionalis yang tidak berpihak kepada PKI, menjauhkan banyak pihak dalam masyarakat dari Soekarno. Sikapnya yang mengabaikan ekonomi dan kesejahteraan makin memiskinkan rakyat pada umumnya dan karena itu membuat banyak rakyat kurang menyukai keadaan, kecuali mereka yang senang politik dan berpihak kepada PKI. Dan sikapnya menganggap kaum cendekiawan kurang berguna menyebabkan banyak sekali kaum terpelajar tidak lagi sim-

pati kepada Soekarno, kecuali kaum cendekiawan yang berpihak kepada PKI.

Padahal mereka yang berpihak kepada PKI, baik itu di lingkungan kaum politik, di kalangan rakyat biasa maupun di antara kaum cendekiawan adalah satu minoritas dibandingkan dengan mereka yang makin tidak senang dan tidak puas dengan keadaan. Maka ketika PKI begitu sembrono dan melakukan usaha merebut kekuasaan dengan membunuh jenderal-jenderal dan seorang kapten TNI di malam hari tanggal 30 September 1965, ketidakpuasan dan ketidaksenangan kepada PKI meledak pula untuk mendukung usaha Jenderal Soeharto dan TNI mengadakan perubahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan mereka. PKI mengira bahwa serangannya terhadap TNI dan pembentukan Dewan Revolusi akan menggerakkan serta memobilisasi massa rakyat untuk mendukung gerakannya. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu mayoritas rakyat kemudian memperoleh kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya kepada PKI dan penganutnya yang sebelumnya bersikap begitu arogan dan mau menang sendiri. Kiranya kaum sejarawan yang sekarang meneliti mengapa rakyat Indonesia waktu itu sampai hati melakukan pembunuhan

terhadap pengikut PKI, hendaknya perlu mempelajari psikologi massa waktu itu. Memang sejak lama orang Indonesia, dan khususnya orang Jawa, dikenal sebagai orang yang lemah lembut dan baik hati. Akan tetapi sebagaimana dapat terjadi banjir bandang yang datang menimpa secara tiba-tiba, demikian pula perasaan rakyat yang lemah lembut itu dapat berubah seketika menjadi perasaan mengamuk, merusak dan membunuh untuk melampiaskan gangguan yang merisaukan bawah sadarnya.

Keberhasilan dan Kegagalan Kepemimpinan Soeharto

Sekarang di masa reformasi banyak orang mengecam Soeharto yang dianggapnya melakukan perebutan kekuasaan pada tahun 1965. Akan tetapi adalah kenyataan bahwa pada tahun 1965 banyak pihak, baik di kalangan kaum nasionalis, para mahasiswa, cendekiawan dan rakyat biasa mendukung Soeharto ketika ia melakukan tindakan meredam gerakan PKI dan pengikutnya. Bahwa dalam usaha itu Soekarno turut menjadi korban adalah konsekuensi dari sikap beliau sejak tahun 1963 yang amat dekat dengan PKI. Sebab tidak ada yang menuduh Soekarno sebagai

orang PKI, juga Soeharto tidak. Semua tahu bahwa Soekarno terbawa oleh arus yang beliau timbulkan sendiri. Jadi di mata mayoritas rakyat Indonesia pada tahun 1965, Soeharto melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kepentingan mereka dan kepentingan negara dan bangsa.

Dukungan itu makin kuat ketika Soeharto secara nyata berusaha memperbaiki kondisi kehidupan rakyat banyak yang sedang menderita karena kurang sandang, kurang pangan dan kurang papan sebagai akibat kepemimpinan Soekarno yang kurang berminat terhadap ekonomi dan kesejahteraan.

Rehabilitasi dilakukan agar ekonomi nasional yang pada akhir kepemimpinan Soekarno menunjukkan inflasi melebihi 600 persen, dapat lebih dikendalikan. Karena Indonesia memerlukan bantuan ekonomi, Soeharto mendekati dunia Barat. Itu tidak menyalahi politik luar negeri bebas aktif selama masih dalam jalur bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif memang bukan satu garis yang sempit sekali, melainkan satu jalur yang memungkinkan manuver sesuai kepentingan nasional. Begitu pula Soekarno ketika mendekati Uni Soviet untuk membeli senjata guna membebaskan Irian Barat. Waktu itu politik Soekarno masih tetap dalam jalur bebas

aktif sekalipun berjalan *left of the centre*. Demikian pula Soeharto masih tetap dalam jalur bebas aktif ketika mendekati Barat untuk memperoleh bantuan ekonomi, sekalipun berjalan *right of the centre*. Kalau meninggalkan kepentingan nasional dan bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat maka itu menandakan bahwa politik sudah keluar dari jalur bebas aktif.

Soeharto dengan bantuan para pakar ekonomi yang dipimpin Wijoyo Nitisastro berhasil melakukan rehabilitasi keadaan sehingga pada tahun 1969 dapat beralih kepada pelaksanaan pembangunan nasional dengan titik berat ekonomi. Diadakan pembangunan prasarana yang mendorong peningkatan produksi pertanian dengan memperbaiki dan menambah jumlah bendungan, jalan-jalan dan komunikasi. Produksi beras dan pertanian lainnya meningkat serta dapat dipasarkan secara lancar. Itu semua menambah penghasilan rakyat. Proses itu setelah berjalan beberapa tahun membuat Indonesia diakui dunia internasional sebagai negara yang mampu secara drastis mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, bersama Cina dan Thailand. Perbaikan transportasi dan komunikasi membuat negara ke-

satuan RI satu kenyataan. Kalau dulu amat sulit melakukan hubungan telepon di dalam kota Jakarta karena keterbatasan alat telepon dan rendahnya kualitas pelayanan, pembangunan komunikasi memungkinkan orang bicara melalui telepon secara jelas dan mudah antara semua kota di Indonesia, bahkan antara Sabang sampai Merauke. Kemajuan transportasi tidak hanya menyangkut transportasi darat, tetapi juga laut dan udara. Itu memungkinkan orang pergi dari Ibu Kota Jakarta sekurang-kurangnya sekali dalam sehari ke semua ibu kota provinsi.

Keamanan juga makin baik dan Indonesia digolongkan negara yang paling aman di Asia Tenggara. Hal itu mengundang para pemilik modal dalam dan luar negeri melakukan investasi di Indonesia dan dengan begitu menciptakan kesempatan kerja yang makin banyak. Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen setahun dan menjadikannya satu di antara negara yang paling maju perkembangan ekonominya di Asia Timur yang lazim disebut *the Asian Tigers*.

Keberhasilan Soeharto juga nampak dalam politik luar negeri yang mengangkat posisi Indonesia di arena internasional. Pertama adalah peran Indonesia yang amat menentukan dalam

pembentukan dan perkembangan ASEAN. Tanpa partisipasi Indonesia tidak dapat digerakkan himpunan regional yang tadinya ada dalam bentuk ASA atau *Association of Southeast Asia*. Baru setelah Indonesia bersedia ikut serta dan pada tahun 1967 terbentuk ASEAN dapatlah himpunan regional Asia Tenggara berjalan. Malahan ASEAN menunjukkan kemajuan yang diakui sebagai himpunan regional di dunia yang sukses. Pentingnya peran Indonesia terlihat ketika kondisinya amat memburuk setelah 1997. Pada waktu itu dan hingga kini ASEAN tidak lagi sekuat dan sekokoh masa tahun 1970-an dan 1980-an.

Keberhasilan Soeharto juga terlihat dalam membawa Indonesia berperan dalam Gerakan Non Blok (GNB). Ketika Indonesia memegang pimpinan GNB pada tahun 1992 dunia pada umumnya, termasuk Barat, mengakui bahwa kepemimpinan Indonesia membuat GNB lebih efektif dalam usahanya memperbaiki kehidupan negara anggotanya. Soeharto berhasil mengajak GNB untuk mengubah sikapnya yang semula konfrontatif terhadap Barat menjadi konsultatif dan lebih koperatif. Dengan cara itu Barat dan khususnya AS dapat diyakinkan bahwa mereka pun berkepentingan akan perbaikan kehidupan berjuta rakyat

yang tinggal di negara-negara anggota GNB yang umumnya miskin. Lebih dari 100 negara menjadi anggota GNB yang berarti bagian terbesar benua Afrika, Asia dan Amerika Latin. Barat akan sangat rugi kalau jutaan rakyat itu antagonistik terhadapnya karena kurang diberi perhatian. Dengan kearifan pimpinan GNB dapat mengajak negara kaya membiayai berbagai usaha yang dijalankan oleh para anggota GNB untuk anggota GNB lainnya. Seperti pelaksanaan pendidikan dalam program Keluarga Berencana (KB) untuk negara-negara Afrika yang menghadapi pertumbuhan penduduk secara cepat diselenggarakan oleh Indonesia yang telah membuktikan keberhasilan dalam KB dan dibiayai Perancis. Dan program-program sosial dan ekonomi lain yang dapat diselenggarakan oleh anggota GNB seperti India dan lainnya untuk kepentingan anggota GNB yang memerlukan. GNB juga memperjuangkan agar negara kaya dapat meringankan pelunasan utang oleh negara miskin di Afrika dan menggunakan dana itu untuk perbaikan negara miskin itu sendiri. Sejak kepemimpinan Indonesia (Soeharto) atas GNB pada tahun 1992 ada besar harapan dapat terselenggaranya dialog antara negara kaya dan miskin yang sebelumnya sukar

terwujud.

Akan tetapi Soeharto, seperti Soekarno, tidak berhasil menjadikan pendidikan satu kegiatan bangsa yang memperoleh perhatian besar, kalau tidak perhatian utama. Padahal ketika Indonesia memperoleh penerimaan besar dengan penjualan minyak dan gas bumi ada kesempatan yang amat bagus untuk menggunakan sebagian besar dari penerimaan itu untuk perbaikan pendidikan. Dan memulai kebiasaan pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan sekitar 4 persen dari GDP atau 20 sampai 25 persen APBN, sebagaimana dilakukan oleh Malaysia sejak permulaan kemerdekaannya. Kalau Soekarno meremehkan arti dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, Soeharto seperti dihinggapi kompleks inferior terhadap dunia ilmu pengetahuan yang membuatnya kurang suka atau kurang memperhatikan pendidikan bagi bangsa. Berbeda sekali dengan sikap almarhum jenderal Gatot Subroto, mantan WAKASAD di masa jenderal Nasution menjadi KASAD, yang selalu mengatakan : "Memang saya hanya lulusan Sekolah Ongko Loro, tetapi anak-anak saya harus mendapat pendidikan yang terbaik agar jangan kalah terhadap bangsa lain."

Karena sikap Soeharto yang

kurang perhatian terhadap pendidikan, tidak mengherankan kalau Indonesia makin tertinggal dalam pendidikan dari negara Asia Tenggara lainnya. Ini tidak hanya berdampak pada kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga amat berpengaruh terhadap karakter bangsa serta perilakunya yang kurang disiplin, menghilangkan sifat sopan santun serta rasa malu. Menjadikan orang Indonesia kurang dapat diandalkan dan dipercaya.

Akan tetapi kegagalan kepemimpinan Soeharto disebabkan oleh hal lain yang lebih serius. Soeharto adalah orang yang tidak terlalu korekt terhadap sifat kejujuran. Itu mungkin terbawa dari nalurinya untuk menjalankan usaha, hal mana mungkin dipengaruhi oleh kehidupan pribadinya yang berat sejak berusia muda. Pada mulanya hal itu tidak terlalu berpengaruh terhadap keadaan, sekalipun juga sudah terjadi perbedaan pendapat antara Presiden Soeharto dan Pak Wilopo yang disertai tugas penelitian terhadap penyalahgunaan wewenang pada tahun-tahun permulaan kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi setelah putera-puteri Soeharto menjadi dewasa dan semua mereka menjalankan bisnis, maka makin merajalela penyalahgunaan wewenang un-

tuk memperkaya diri. Rupanya pembangunan ekonomi juga berpengaruh terhadap meningkatnya sifat serakah (*greed*) yang makin meluas di Indonesia, terutama di kalangan atas. Itu menjadi makin gawat ketika para putera-puteri berbisnis dan membuka kesempatan kepada siapa saja asalkan mau menguntungkan kepentingan mereka. Korupsi-Kolusi-Nepotisme atau KKN mulai merajalela di Indonesia. Di masa kepemimpinan Soekarno juga sudah ada KKN, tetapi ukurannya masih amat terbatas. Dengan kemajuan pembangunan ekonomi, maka di masa Soeharto KKN menyangkut bukan saja bermilyar rupiah, tetapi bermilyar dollar. Makin terjadi perbedaan tajam antara orang kaya dan miskin dan itu menimbulkan ketidakpuasan yang makin kuat dalam masyarakat.

Karena Soeharto sendiri juga kena gangguan sifat serakah, maka ia berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya. Sebenarnya kalau Soeharto berseedia meniru yang dilakukan Deng Xiaoping di Cina dan Lee Kuan Yew di Singapore, yaitu meninggalkan kekuasaan dan posisi resmi ketika sudah berhasil membawa kemajuan, kepemimpinan Soeharto akan tercatat dalam sejarah dengan keberhasilan besar. Ibu Tien Soeharto sendiri sudah menasehati suaminya

agar pada tahun 1988 mundur sebagai Presiden RI karena sudah cukup banyak mengabdikan pada negara dan bangsa. Juga penulis ini sendiri mengajukan saran tertulis agar Soeharto meninggalkan kekuasaan dan posisi resmi. Toh dalam posisi tidak formal Soeharto tetap akan besar pengaruhnya dan wibawanya, seperti terbukti pada Deng Xiaoping dan Lee Kuan Yew. Dengan bersedia meninggalkan posisi resmi Soeharto membuktikan bahwa ia tidak haus kekuasaan dan memberikan teladan yang baik sekali kepada bangsa. Akan tetapi semua nasehat itu dianggap sepi, karena pandangannya yang sempit dan dorongan orang-orang di sekeliling Soeharto yang menarik manfaat besar dari kekuasaannya. Sifat serakah itu terbuka ketika diumumkan dalam majalah Fortune di AS bahwa kekayaan keluarga Soeharto termasuk sepuluh orang terkaya di dunia.

Untuk melanggengkan kekuasaannya Soeharto menjalankan kebijaksanaan politik yang semata-mata tertuju kepada kepentingan pribadinya dan keluarganya. Ketika pimpinan ABRI beralih dari tangan Angkatan 1945 kepada Generasi Penerus (yang masuk ABRI setelah tahun 1950), maka mudah sekali bagi Soeharto untuk memanfaatkan ABRI guna memperkokoh dan

melanggengkan kekuasaannya di seluruh Tanah Air. Hal itulah yang kemudian mencemarkan reputasi ABRI di kalangan luas masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa dan cendekiawan. TNI yang sejak tahun 1945 dikenal dekat dengan rakyat, berubah menjadi organisasi yang mengutamakan kekuasaan yang dilayannya.

Karena kondisi bangsa yang diliputi KKN dan penggunaan kekuasaan secara berlebihan tanpa memperhatikan keadilan, maka timbul kerawanan yang menggerogoti kekuatan negara dan ketahanan nasional. Ketika pada tahun 1997 terjadi Krisis Ekonomi maka kerawanan itulah yang membuat Indonesia terpuruk dan sampai sekarang belum dapat diatasi. Banyak pakar Barat, khususnya yang ada di IMF, salah terka tentang Indonesia. Ketika pada bulan Agustus 1997 krisis menyerang Malaysia dan Thailand, para pakar IMF itu mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terkena gangguan ekonomi seperti dua negara itu. Kata mereka, *the fundamentals in Indonesia are solid and sound*, dasar-dasar Indonesia kokoh dan sehat. Akan tetapi mereka terkejut ketika mulai November 1997 Indonesia mengalami pukulan yang makin hari makin keras. Dan Soeharto sudah tidak mampu lagi menghadapi pukul-

an-pukulan itu karena semuanya telah terjadi akibat kerawanan yang ia ciptakan atau ijinakan untuk berkembang. Ketika pada bulan Mei 1998 Soeharto *lengser keprabon* atau mundur dari kekuasaan, kondisinya sudah amat berbeda dengan keadaan tahun 1988 dan permulaan 1990-an. Sekarang mundurnya Soeharto bukan lagi satu tindakan yang merupakan teladan dan *gesture* yang ampuh, melainkan justru mundur karena sudah kewalahan. Kondisi negara dan bangsa sudah amat kalut dan terjadi krisis multidimensional, tidak lagi hanya krisis ekonomi. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 pun tidak berhasil untuk memperbaiki keadaan negara dan bangsa, malahan lebih menjeratnya dalam kesulitan yang kompleks.

Satu faktor yang juga berpengaruh terhadap kegagalan kepemimpinan Soeharto adalah keputusan yang dibuatnya pada tahun 1975 untuk memasuki Timor Timur dengan satu operasi militer. Memang secara resmi yang dijalankan adalah satu operasi intelijen yang dipimpin langsung oleh Assisten Intelijen Hankam. Akan tetapi dalam kenyataan yang dilakukan adalah operasi militer yang mengerahkan kekuatan darat, laut dan udara. Serangan pertama dapat merebut ibu kota Timor Timur

Dilli. Akan tetapi rupanya tidak ada perkiraan dan persiapan sebelumnya untuk menghadapi perlawanan gerilya Fretilin dan dukungan luar negeri terhadap perlawanan itu. Mungkin pelaksanaan operasi itu kurang belajar dari sejarah RI sendiri ketika menghadapi serangan Belanda ke Yogyakarta serta perlawanan gerilya TNI dan rakyat yang akhirnya mengusir Belanda dari Indonesia. Sebab ketidakmampuan untuk mencapai kemenangan militer yang tuntas amat merugikan dan melemahkan posisi Indonesia di dunia internasional. Sedangkan di pihak lain gerakan itu mengorbankan tidak sedikit anggota TNI. Sekalipun Indonesia secara formal memasukkan Timor Timur sebagai bagian wilayah nasional RI, tetapi hal itu tidak diakui dunia internasional. Indonesia tidak hanya kehilangan pamor sebagai negara yang konsekuen melawan *aggressor*, secara ekonomis gerakan Timor Timur juga menelan banyak sumber daya yang sebenarnya lebih berguna bagi kepentingan rakyat Indonesia. Tidak terlalu jelas mengapa Soeharto mengizinkan dilakukannya gerakan itu yang amat merugikan kepemimpinannya, baik di luar maupun dalam negeri. Ada yang mengatakan bahwa Soeharto tidak kuat menangkis dorongan AS yang

khawatir Timor Timur akan mendekati Uni Soviet atau Cina dan dibangunnya pangkalan militer Soviet di wilayah itu. Akan tetapi kalau itu benar, mengapa Soeharto tidak dapat mendesak AS untuk membantunya mengakhiri perlawanan gerilya Fretilin dan menekan dukungan internasional terhadap perlawanan gerilya itu. Yang jelas adalah bahwa masalah Timor Timur termasuk satu kegagalan besar dalam kepemimpinan Soeharto, karena melakukan gerakan militer tanpa dapat mencapai kemenangan tuntas dalam waktu tidak terlalu lama.

Sebagaimana dengan Soekarno, segala keberhasilan Soeharto seakan-akan terhapus bersih oleh keagalannya. Terutama karena banyak kegagalan terjadi pada akhir kepemimpinannya tanpa ia mampu mengatasinya.

PENUTUP

Paparan keberhasilan dan kegagalan kepemimpinan Pre-

siden Soekarno dan Presiden Soeharto di atas mungkin masih jauh dari lengkap. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa sudah dikemukakan aspek-aspek pokok dari keberhasilan dan kegagalan itu.

Harapan kita semoga para pemimpin Indonesia yang pada tahun 2004 terpilih memikul tanggungjawab menegakkan kepemimpinan, dapat belajar dari pengalaman dua Presiden kita itu. Sudah jelas bahwa keberhasilan kepemimpinan meningkatkan Ketahanan Nasional Indonesia, sedangkan kegagalan sebaliknya. Oleh sebab itu demi masa depan negara dan bangsa kita, semoga para pemimpin Indonesia menyadari betapa penting peran mereka untuk menjamin kokohnya Ketahanan Nasional, yaitu terjaganya kelangsungan hidup bangsa sampai akhir zaman dan tercapainya Tujuan Nasional untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.